

Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMP Berbasis Pesantren

Efriana Laela Karomah¹, Nurfuadi²

^{1,2} UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: efrikaromah@gmail.com¹, nurfuadirekso@gmail.com²

Abstrak

Sekolah tidak lepas dari administrasi dari peserta didik untuk pelaksanaan operasional sekolah. Sehingga ada proses perencanaan manajemen pembiayaan untuk berjalannya proses pembelajaran dengan nyaman. Maka penelitian ini mendalami akan mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan di SMP dengan berbasis pesantren, yakni SMP Ma'had Darussa'adah Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Subjek Penelitian adalah Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara dan Pengurus Pondok Pesantren Darussa'adah. Hasil penelitiannya menunjukkan, 1) Manajemen pembiayaan di SMP Ma'had Darussa'adah meliputi Perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan; 2) Perencanaan pembayaran dilakukan dengan anggaran jangka 4 tahun (RKJM) dan 1 tahun (RKAS), pelaksanaannya terdapat dua bendahara, satu bendahara komite yang mencatat keuangan bersumber dari Yayasan, Orang Tua Siswa, dan Donatur yang tidak mengikat. Satu bendahara yang mencatat keuangan bersumber dari dana BOS; 3) pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala oleh Yayasan, kepala sekolah dan juga dari unsur dinas kabupaten dan dilakukan dalam bentuk laporan baik secara offline dan online (Dana BOS). Dari sinilah, Manajemen Pembiayaan di SMP Ma'had Darussa'adah dilakukan secara terpisah dengan pembiayaan di Pondok Pesantren meskipun berada dalam satu lingkungan, sehingga kegiatan pembiayaan dapat berjalan secara efektif. Meskipun demikian Yayasan tetap melakukan pengawasan terhadap SMP sebagai bentuk tanggungjawab.

Kata kunci: *Manajemen Pembiayaan, Pendidikan, SMP berbasis Pesantren*

Abstract

Schools cannot be separated from the administration of students for the implementation of school operations. So that there is a financing management planning process for the learning process to run comfortably. So this study will explore the management of education financing in a pesantren-based junior high school, namely SMP Ma'had Darussa'adah Cilongok, Banyumas Regency. This study uses a qualitative descriptive approach by examining the phenomena that occur in the field. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The research subjects were the Principal, Head of Administration, Treasurer and Board of Darussa'adah Islamic Boarding School. The results of the research show, 1) Financing management at SMP Ma'had Darussa'adah includes planning, implementation and supervision; 2) Payment planning is carried out with a budget of 4 years (RKJM) and 1 year (RKAS), there are two treasurers, one committee treasurer who records finances from the Foundation, Parents of Students, and non-binding donors. One treasurer who records finances sourced from BOS funds; 3) supervision of education financing is carried out periodically by the Foundation, school principals and also from elements of the district office and is carried out in the form of reports both offline and online (BOS Funds). From here, Financing Management at SMP Ma'had Darussa'adah is carried out separately from financing at Islamic Boarding Schools even though they are in the same environment, so that financing activities can run effectively. However, the Foundation continues to supervise SMP as a form of responsibility.

Keywords: Financing Management, Education, Islamic Boarding School-based Middle School

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh komponen sistem pendidikan baik terprogram ataupun tidak terprogram guna memproses pendidikan yang berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan dalam upaya penyelenggaraannya memiliki unsur penting yaitu pembiayaan. Pembiayaan menjadi salah satu sumber peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) dan proses kelancaran pembiayaan sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan maksimal. Setiap lembaga sekolah memiliki administrasi dalam Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang berbeda dari nominal peserta didik yang ia bayar. Maka SPP menjadi acuan penting untuk berjalannya proses pembelajaran guna membayar kebutuhan sekolah dan memfasilitasinya (Nurdiyanti & Pendidikan, 2018). Dari sinilah, manajemen pembiayaan menjadi salah satu kunci atas keberhasilan setiap lembaga pendidikan dalam meningkat dan memajukan kualitasnya (Abidin & Achmad Anwar, 2017).

Pemerintah berperan penting dalam kebijakan pendidikan, demi terciptanya kondisi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang tentu dicantumkan dalam undang-undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, nilai agama, dan kemajemukan bangsa. Artinya, berkeadilan dan tidak diskriminatif disini merupakan setiap penduduk negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang agama, suku dan ras dalam bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah harus merata ke seluruh lembaga pendidikan di nusantara sehingga tercapai tujuan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Suwardi et al., 2020).

Hoy & Miskel (2008) menganalisis terjadinya faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di setiap sekolah yaitu, iklim organisasi, sarana prasarana, pembiayaan dan kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya organisasi. Morphet, (1983). "Biaya pendidikan memberikan jalan positif untuk menaruh kesejahteraan pendidik dalam mengajar dan kenyamanan fasilitas sekolah, sehingga kepemimpinan dan tenaga pendidik membuat sistem manajemen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu". Hal ini seperti ada komponen dari pihak tata administrasi, teknis pendidikan, kepala sekolah, dan guru harus berhubungan untuk sinergis. Sebab, demi berjalannya kinerja operasional sekolah dibentuk dari hubungan yang saling menguntungkan agar dapat memperoleh kesiapan kinerja yang maksimal dan outputnya yang bermutu dalam suatu pembiayaan lembaga.

Berbagai peneliti menyempurnakan penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah sebagai penguatan perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan manajemen. Ada perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Dony Oscar dalam penelitiannya ada sistem SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang efektif untuk memicu kinerja setiap lembaga supaya menjadi baik, SPP dilakukan dengan basis digital supaya semua anggota sekolah dapat mengakses informasi pendidikan terutama dalam pembiayaan. Dony Oscar melakukan penelitian di Mts Al-Ikhsan Pondok Gede Bekasi dalam pengamatannya mendapat keresahan dari guru dan siswa untuk menggunakan pembayaran secara manua (Oscar et al., 2019). Hal ini ditegaskan oleh Rizal Fahmi Awaludin, dkk. Bahwa manajemen pembiayaan pendidikan harus dirancang dengan sistem digital keuangan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi keuangan untuk sekolah, hal ini menjadi

sarana dalam mempermudah dan mengatasi kesalahan dalam proses laporan keuangan sekolah (Fahmi Awaludin et al., 2021).

Dari hasil dan penelitian terdahulu memberi relevansi dan penguat untuk mendalami manajemen pembiayaan sekolah supaya ada sistematika manajemen bisa diterapkan di setiap sekolah. Peneliti mengambil sampel di SMP Ma'had Darussa'adah Cilongok merupakan sekolah pendidikan formal yang di wadahi oleh Yayasan Pondok Pesantren Darussa'adah sejak tahun 2015, SMP sudah usia ke 8 tahun, artinya SMP Ma'had Darussa'adah tergolong masih baru dalam menyelenggarakan pendidikan formal. Manajemen pembiayaan pendidikan, dalam penyelenggaraannya sekolah harus benar-benar dapat mengelola dengan baik dan tepat agar pemasukan dapat memenuhi kebutuhan, akan tetapi pada realisasinya sekolah kerap mengalami kesulitan seperti terlambatnya pencairan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), wali murid yang tidak rutin setiap bulannya membayar SPP sedangkan pembiayaan sekolah membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi (Sandra, 2013). Di sinilah, peran manajemen Pembiayaan pendidikan dibutuhkan untuk mengelola pembiayaan dengan baik. Manajemen pembiayaan disebut juga dengan manajemen biaya ini harus dikuasai oleh lembaga pendidikan maupun tenaga kependidikan, karena dengan adanya sebuah sistem operasional yang bagus dan rapi terstruktur ini sangat menyakinkan kepada masyarakat bahwasannya lembaga pendidikan ini sangat transparansi dalam urusan keuangan, sehingga tidak ada salah paham atau terjadinya sebuah keraguan masyarakat kepada lembaga pendidikan.

Manajemen pembiayaan merupakan sistem pengelolaan keuangan untuk menjalani prosesnya kinerja pembelajaran guru dengan peserta didik dengan nyaman. Umumnya manajemen memiliki sistem adanya perencanaan, tata cara pelaksanaan, arahan, dan pengendalian (Handayani & Rasyid, 2015). Hal ini semua anggota berperan sesuai sistem kerja sebagai pendidik di setiap lembaga sekolahnya. Sebab, jika tidak ada manajemen pembiayaan tidak mungkin pendidikan terwujud optimal, efisien, dan efektif. Dari sinilah, pentingnya manajemen pengelolaan keuangan harus diatur dan dikelola dengan baik agar dapat bersinergi dalam aktivitas pembelajaran di sekolah dengan baik.

Penelitian ini fokus pada manajemen pembiayaan sekolah SMP Ma'had Darussa'adah Cilongok yang kerap mengalami problem pada sistem pembayaran lembaga formal yang berada di satu lingkungan yayasan. Artinya ada campur tangan yayasan dalam pengelolaan keuangan, yaitu menggabungkan antara pemasukan pondok dan pemasukan sekolah bahkan yang menjadi bendahara adalah pihak yayasan tersebut, hal ini tentunya belum selaras dengan konsep manajemen pembiayaan, karena pelaksanaan pembiayaan di pondok dan di sekolah harus terpisah. Dari sinilah, peneliti tertarik pada permasalahan ini untuk mengkaji lebih dalam sistem manajemen pembiayaan Pendidikan di SMP Berbasis Pesantren (Studi Kasus di SMP Ma'had Darussa'adah Cilongok).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengkaji fenomena lapangan (*field reseatch*) yang terjadi. Konsep penelitian ini berfokus pada cerita, narasi, dan deskripsi perihal pengelolaan manajemen pembiayaan sekolah di SMP dengan basis pesantren. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di SMP Ma'had Darussa'adah Desa Gununug lurah RT 03/RW 02 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Bayumas sejak tanggal 1 Juni sampai 30 Juli 2022. Artinya, informasi penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan mengandalkan penilaian melalui teknik wawancara melalui observasi secara langsung. Kemudian peneliti dengan mengambil sumber data-data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi (Meleong, 2004). Sedangkan data skunder diperoleh dari data pendukung seperti data kearsipan, dokumen fisik ataupun non fisik berupa file.

Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan proses manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Ma'had Darussa'adah yang terdiri atas proses penganggaran, proses pencatatan keuangan, proses pengawasan keuangan, proses pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, peneliti mencari sumber data-data yang dilakukan secara reduksi data untuk mengklasifikasi data sesuai tujuan penelitian ini. Adapun reduksi data-datanya yang diperoleh melalui manajemen pembiayaan sekolah SMP Ma'had Darussa'adah sebagai temuan untuk mengembangkan keilmuan manajemen pendidikan yang signifikan. Penelitian ini fokus dalam manajemen pembiayaan pendidikan SMP Ma'had Darussa'adah berupa, (1) Perencanaan Pembiayaan, (2) pelaksanaan pembiayaan (3) Bersumber Dari Dana Komite, (4) Bersumber dari dana BOS, dan (5) pengawasan pembiayaan

Selanjutnya dalam teknik wawancara menggunakan dua cara yakni wawancara offline dan wawancara online. Wawancara offline, peneliti dengan Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara dan Pengurus Pondok Pesantren Darussa'adah. Sedangkan wawancara online bersama dengan orang tua sebagai wali murid. Dari sinilah, peneliti menemukan penemuan melalui deskripsi singkat dan jelas melalui penyajian data-data ini yang akan menguraikan perihal manajemen pembayaran pendidikan di SMP Ma'had Darussa'adah. Adapun hasil pengamatannya berupa sistem manajemen pembiayaan pendidikan mulai rencana, pengelolaan, dan evaluasi pembayaran dengan model manajemen pendidikan (Sugiyono, 2010). Tahapan selanjutnya, menarik kesimpulan atau verifikasi, penarikan ini untuk menyimpulkan hasil dan pembahasan untuk mengambil titik penting melalui sumber data yang ia peroleh dalam kalimat data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan

Minarti menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan salah satu fokus utama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan pengembangan sekolah dalam jangka waktu tertentu seperti anggaran kebutuhan dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun (Fahmi Awaludin et al., 2021).

Adapun proses perencanaan Pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di SMP Ma'had Darussa'adah yakni, *Pertama* sudah tertuang di RKJM (Rencana Kegiatan Jangka Menengah) yang disusun untuk jangka empat tahun kedepan yaitu mulai dari tahun 2020- 2024. Kedua perencanaan pembiayaan kembali dituangkan kedalam ARKAS yaitu untuk jangka satu tahun. Sejak januari sampai dengan desember dengan mengacu pada 8 standar pendidikan, diantaranya; kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar penilaian, untuk tahun ini SMP sudah mulai menggunakan ARKAS atau disebut dengan (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dalam pembuatan perencanaan pembiayaan yang dikhususkan bersumber dari dana BOS.

Rapat awal perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Ma'had Darussa'adah, selain dihadiri guru kami juga melibatkan yayasan, komite, dan perwakilan wali siswa masing-masing tingkatan kelas. Dengan terlibatnya yayasan, komite, dan wali siswa diharapkan adanya transparansi penggunaan dana pendidikan di sekolah serta diharapkan ada masukan, sumbang saran dari yayasan, komite, dan wali siswa (Wawancara dengan Kepala SMP Ma'had Darussa'adah).

Lebih lanjut dijelaskan, pencatatan rencana pembiayaan pendidikan di tempat kami, terbagi menjadi dua berdasarkan sumber, yaitu 1) perencanaan penggunaan biaya pendidikan bersumber

dari yayasan dan masyarakat (orang tua siswa, dan donatur yang tidak mengikat) disebut dana Komite. 2) Perencanaan penggunaan biaya pendidikan bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS yang perencanaannya dengan ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah). *Kedua*, sumber tersebut tercatat dalam buku yang berbeda karena sumber dari masyarakat tidak terikat juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah, dana Komite ini digunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi oleh dana BOS. Sumber pembiayaan pendidikan ke dua yaitu dana BOS, dikelola sekolah sesuai dengan Juknis BOS dimana dalam juknis terdapat kegiatan yang boleh dan tidak boleh digunakan menggunakan dana BOS. Sebagai contoh yaitu dana BOS tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, yang boleh adalah rehap ringan dan perawatan sarana prasarana, sedangkan sekolah kami ditahun ini sedang membutuhkan dana yang banyak untuk mendirikan ruang kelas baru maka kami siasati dengan menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat tadi atau dana Komite. (Wawancara dengan Bendahara Komite SMP Ma'had Darussa'adah).

Rencana Pembiayaan SMP Ma'had Darussa'adah yang sudah di rencanakan sejak tahun 2020 adalah penambahan ruang kelas baru (RKB) karena sekolah masih kekurangan kelas, pengadaan ruang kantor guru, karena kantor Guru sementara ini masih menggunakan ruang perpustakaan, pengadaan WC/ Kamar Mandi Guru karena selama SMP berdiri guru belum memiliki WC Guru masih menggunakan fasilitas Pondok Pesantren. Selain kebutuhan yang besar tadi, biaya operasional bulanan dan harian juga harus dianggarkan. Seperti honor guru dan karyawan, meskipun boleh di danai dana BOS, tapi SMP tidak sepenuhnya menggunakan dana BOS, karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dianggarkan. Operasional harian seperti konsumsi guru, ATK dan sebagainya. (wawancara dengan Kepala tata usaha).

Menurut Fattah menyatakan bahwa dalam penyusunan sebuah anggaran harus berdasarkan pada beberapa prinsip diantaranya: (1) menentukan *job description* yang jelas sesuai dengan sistem manajemen dalam organisasi; (2) terdapat sistem keuangan yang tepat dalam pelaksanaan anggaran; (3) terdapat pengamatan dan penilaian untuk memantau kinerja organisasi; serta (4) mendapatkan dukungan dalam pelaksana mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Adapun prosedur dalam penyusunan anggaran diantaranya: (1) mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; (2) mengidentifikasi sumber uang, jasa dan barang; (3) anggaran pada dasarnya merupakan sebuah laporan keuangan, sehingga semua sumber dinyatakan dalam istilah finansial; (4) menyusun anggaran sesuai dengan format yang telah disetujui dan digunakan oleh instansi tertentu; (5) menyusun proposal anggaran untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang; (6) melakukan perbaikan anggaran; (7) persetujuan perbaikan anggaran; (8) persetujuan anggaran (Suwardi et al., 2020).

Setelah dilakukan perencanaan pembiayaan pendidikan, terjadi kesepakatan dan pengesahan pembiayaan sekolah maka hasil dari rapat perencanaan penggunaan pembiayaan pendidikan, kami sampaikan kepada seluruh wali siswa kelas VII, VIII, dan IX pada saat rapat pleno yang diadakan setiap awal tahun pelajaran, papan informasi penggunaan dana BOS yang dipajang di Sekolah agar dapat di baca oleh masyarakat dan siswa, dan kami juga sharing informasi tersebut melalui grup *Whatsapp* orang tua (Wawancara dengan Kepala Tata Usaha).

Berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, SMP Ma'had Darussa'adah tetap tetap memperhatikan prinsip transparansi terhadap masyarakat dengan memberitahukan rencana penggunaan dana tersebut. Selain itu SMP Ma'had Darussa'adah juga memisah penggunaan dana sekolah yang bersumber dari pemerintah dan bersumber dari masyarakat dengan menunjuk dua bendahara yang berbeda yaitu bendahara Komite dan bendahara BOS karena pada saat

pelaksanaan dibutuhkan keahlian seorang dalam manajemen dalam hal ini tidak lepas dari kebijakan dan kepemimpinan kepala sekolah.

Pada dasarnya, perencanaan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menetapkan sebuah rancangan awal untuk dapat mencapai tujuan akhir yang dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi di masa yang akan datang (Solihin, 2012). Kegiatan penentuan kebutuhan pembiayaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh sekolah untuk melakukan strategi pendanaan. Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah keputusan mengenai pemerolehan, pengeluaran, pemeliharaan dan penggunaan dana yang dibuat dalam rancangan keuangan dan yang terintegrasi dalam kebijakan sekolah sebagai rujukan utama alokasi dana sekolah (Rusdiana, 2017).

Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan merupakan tindakan yang terlaksana karena adanya sebuah rencana yang telah disiapkan dengan sangat mendetail. Di Indonesia, peraturan tentang penyelenggaraan pembiayaan pendidikan diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 (Depdiknas, 2008). Kedua PP tersebut pada umumnya membahas terkait dengan pembiayaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dalam penyebutannya berbeda akan tetapi pada intinya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

SMP Ma'had Darussa'adah adalah lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan pembiayaan pendidikan secara mandiri artinya selain pendapatan bersumber dari dana BOS, pembiayaan juga bersumber dari masyarakat yaitu orang tua siswa dimana SPP perbulannya Rp 70.000 untuk semua tingkatan dari kelas VII, VIII dan IX.

Pembukuan di SMP Ma'had Darussa'adah dalam pelaksanaan pembiayaannya menggunakan kartu Pembayaran (yang berfungsi untuk segala pembayaran baik SPP, Infaq gedung/tahun, kegiatan PTS/PAS, dan daftar ulang), kartu tersebut dipegang oleh siswa atau orang tua siswa, kartu pembayaran berlaku selama tiga tahun dan wajib dibawa pada saat akan melakukan pembayaran. Berikut penjelasan pelaksanaan pembiayaan di SMP Ma'had Darussa'adah:

Bersumber Dari Dana Komite

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan (Handayani & Rasyid, 2015). SMP Ma'had Darussa'adah melaksanakan penggalangan dana melalui sumbangan dari Orang Tua Siswa yang berupa SPP setiap bulannya sebesar Rp 70.000 untuk kelas 7, 8 dan 9 seluruhnya berjumlah 224 siswa. berarti di tahun ajaran 2022/2023 pemasukan dari orang tua siswa sendiri sebesar Rp 16.680.000. dengan catatan wali siswa rutin membayar setiap tanggal 10 tiap bulan. Selain dari iuran SPP ada pembayaran uang gedung kelas VII sebesar Rp 700.000/Tahun, kelas VIII Rp 400.000/Tahun, kelas IX 200.000/Tahun.

Pemasukan di catat kedalam buku yang berbeda untuk setiap angkatan, hal ini dilakukan sebagai upaya memudahkan bendahara dalam melakukan catatan, perekapan dan laporan. Berdasarkan hasil dan observasi yang dilakukan, bahwa di tahun 2020 SMP merencanakan kegiatan pengadaan ruang kelas baru dan pengadaan kamar mandi/ WC untuk guru, di mana ruang kelas baru telah selesai pengerjaannya lantai satu dapat digunakan untuk pembelajaran pada tahun ajaran

2021/ 2022 dan lantai dua dapat di gunakan untuk pembelajaran pada tahun ajaran 2022/ 2023. Sedangkan pengadaan kamar mandi/ WC guru selesai pengerjaannya di bulan juni 2022.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan pembiayaan, SMP tidak terlepas dari masa sulit salah satunya adalah tidak ada pemasukan yang bersumber dari orang tua/wali siswa berupa uang SPP tiap bulan sebesar 70.000/ siswa. Yang diakibatkan pandemi covid 19 pada Tahun 2020, melemah pula penghasilan orang tua/wali siswa yang notabennya pekerjaannya adalah sebagai petani dan buruh harian lepas. Ditambah dana BOS yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan/ pengadaan ruang kelas baru, hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penyelesaian ruang kelas baru lantai 1 dan lantai 2. Akan tetapi di tahun 2022 keuangan mulai stabil dengan kembalinya siswa belajar tatap muka, orang tua dan masyarakat mulai antusias dan semangat dalam melaksanakan tanggungjawab terkait dengan pembiayaan putra-putrinya. Adanya kerjasama sekolah dengan yayasan dan komite sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat terealisasi dengan tidak melampaui jauh dengan target yang telah ditentukan.

Bersumber dari dana BOS

Rincian komponen penggunaan dana BOS Reguler digunakan untuk :a) penerimaan peserta didik baru; b) pengembangan perpustakaan; c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi; e) pelaksanaan administrasi kegiatan; f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g) pembiayaan langganan dana dan jasa; h) pemeliharaan sarana dan prasarana; i) penyediaan alat multi media pembelajaran. (lampiran 1 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional hal 7-10).

Besarnya Perolehan Dana BOS dipengaruhi oleh banyaknya siswa, satu siswa sebesar Rp. 1.100.000 dikalikan jumlah siswa yang terinput dalam aplikasi dapodik, untuk tahun 2022 SMP Ma'had Darussa'adah mendapat Dana sebesar Rp 227.700.000 untuk pencairan di bagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 (Januari – April), tahap 2 (Mei-Agustus), tahap 3 (September- Desember), dana akan turun ke rekening sekolah pada bulan pertama di setiap tahap, akan tetapi terkadang mengalami kemunduruan sampai dua bulan lamannya seperti tahap 2 ini saja sampai bulan juli belum masuk rekening sekolah yang seharusnya di bulan Mei dana sudah turun. untuk rincian penggunaan dituangkan dalam ARKAS Tahun 2022. (Wawancara dengan Bendahara BOS SMP Ma'had Darussa'adah

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMP Ma'had Darussa'adah yang bersumber dari dana BOS diwujudkan dalam kegiatan realisasi kegiatan PPDB Tahun 2022 yaitu untuk cetak brosur PPDB, dan Pengandaan Formulir. Pengembangan Perpustakaan yaitu dengan penambahan buku pelajaran untuk siswa, terutama untuk kelas VII dimana tahun pelajaran 2022/2023 sudah menggunakan kurikulum merdeka mandiri berubah. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dan Ektrakurikuler diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pagarnusa(pencak silat), hadroh, desain grafis, paduan suara, seni baca al-qur'an dimana semua kegiatan dapat didanai BOS, termasuk Honor pelatih ekstrakurikuler dari luar (bukan unsur guru), tranport dan sewa kendaraan kegiatan lomba-lomba yang diadakan sub rayon dan dinas pendidikan. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di SMP Ma'had Darussa'adah untuk membiayai pengadaan soal-soal ulangan harian, PTS, PAS dan PAT. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembayaran listrik, wifi dan telepon, jasa upah tukang apabila ada sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki atau dirawat.

Dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan dana BOS, bendahara tidak sendiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah tercantum dalam ARKAS, bendahara dibantu waka

bidang sarana dan prasara dalam pengadaan barang meja kursi siswa mulai dari pemesanan hingga penerimaan barang, pengadaan media pembelajaran, perawatan gedung sekolah, perawatan mesin fotocopy dan komputer. Dalam pengadaan ATK dibantu oleh staff TU (Tata Usaha), begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan lainnya meskipun sudah ada rapat di awal namun selalu mengedepankan koordinasi kepada kepala sekolah, guru dan karyawan secara *intens*. Disetiap transaksi, oleh bendahara di catat dalam Buku Pembantu Kas Umum (BPKU) yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun laporan BOS di setiap tahapannya.

Pada dasarnya manajemen pengelolaan keuangan dana pendanaan dalam pendidikan bersifat publik, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Abdullah (2012; 12), bahwa fokus pengelolaan keuangan dan pendanaan pendidikan adalah sebuah upaya dalam mengelola sumber pendanaan yang tersedia bagi lembaga pendidikan seefektif mungkin. Dana yang peroleh dapat digunakan untuk memberikan fasilitas yang digunakan dalam layanan pendidikan yang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pendanaan lembaga pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di SMP Ma'had Darussa'adah, pedoman pengelolaan dana masyarakat mencakup kerangka struktural yayasan dan kepala sekolah. Sedangkan dari dana BOS, pedoman disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejauh ini di tahun 2022 dalam pelaksanaan pembiayaan SMP Ma'had Darussa'adah belum mengalami kesulitan yang berarti semisal Honor Guru dan Karyawan belum terbayarkan sampai dua bulan lebih, kebutuhan operasional harian tidak terpenuhi, mengalami *minus* anggaran. Hal ini dikarenakan adanya peran penting dari Yayasan yaitu memisahkan manajemen pembiayaan pondok pesantren dengan manajemen pembiayaan SMP sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.

Jika dalam pelaksanaan pembiayaan terjadi ketidak seimbangan pendapatan dan pengeluaran, maka anggaran pengeluaran akan ditunda untuk tahap anggaran selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembiayaan yang ada di SMP Ma'had Darussa'adah adalah jenis pembiayaannya berupa biaya langsung yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan tidak rutin sekolah. Sedangkan dana yang berasal dari dana BOS akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Dalam hal ini, yang disebut dengan biaya langsung adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh sekolah, siswa, atau keluarga siswa. Pemasukan biaya langsung dapat dengan mudah dihitung karena data tersedia di sekolah, berbeda dengan dana tidak langsung yang sulit untuk dihitung. Biaya langsung pada umumnya berupa uang yang dapat digunakan untuk mendanai secara langsung penyelenggaraan proses belajar mengajar. Biaya langsung mempengaruhi kualitas hasil pendidikan dan pelaksanaan kegiatan akademik lainnya (Suhardan, 2012).

Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi, kalau terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki.

Pengawasan pembiayaan di SMP Ma'had Darussa'adah dilakukan secara langsung oleh yayasan dan kepala sekolah. Kepada yayasan SMP melaporkan penggunaan dana komite dan dana

BOS setiap akhir bulan fungsinya agar yayasan mengetahui bagaimana kondisi keuangan SMP sehingga apabila sekolah mengalami hambatan dan kekurangan dalam pengelolaannya yayasan dapat membantu dengan memberikan arahan dan solusi. Kepala sekolah melakukan pengawasan secara rutin dengan mengecek catatan buku pemasukan dan pengeluaran pendanaan dari dana komite dan dana BOS, hal ini kepala sekolah lakukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses penggunaan dana apakah sudah tepat dan efektif.

Desember 2021 lalu, sudah menjadi kegiatan rutin Pengawas dan SMP Ma'had Darussa'adah mengadakan PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah) dimana Pengawas dari unsur dinas kabupaten Banyumas melakukan penilaian kepada kepala sekolah, guru dan karyawan terhadap kinerjanya selama satu tahun dengan mengacu kepada 8 standar, salah satunya adalah standar pengelolaan dan pembiayaan, disini bendahara komite dan bendahara BOS dievaluasi langsung mengenai penggunaan dana di SMP Ma'had Darussa'adah, dokumen yang disiapkan adalah Laporan Penggunaan Dana komite, RKJM, Juknis BOS, ARKAS, BKU (Buku Kas Umum), Buku Bank, Buku Pajak lengkap dengan lampiran-lampiran kwitansi. Kegiatan PKKS adalah wujud dari pengawasan pembiayaan yang dilakukan Pengawas SMP dalam bentuk pemantauan dan evaluasi, apabila terjadi temuan atau penggunaan yang kurang tepat, kurang efektif maka dapat segera diperbaiki. Fungsi pengawas juga sangat membantu, karena tidak hanya memberikan kritikan, tapi memberikan saran dan mengawal sekolah terutama bendahara BOS dalam penggunaan Aplikasi RKAS, karena bagi SMP Ma'had Darussa'adah di tahun 2022 adalah pertama kali menggunakan Aplikasi RKAS jadi masih ada kesulitan dalam penggunaannya. Dengan pemantauan yang dilakukan oleh pengawas, maka bendahara BOS dapat menyelesaikan ARKAS dengan tepat waktu sehingga dana BOS Tahap III dapat turun ke Rekening SMP Ma'had Darussa'adah.

kalo untuk dana BOS bentuk pelaporannya harus ke Dinas Pendidikan Kabupaten bentuk laporan fisik, ke provinsi dan atau pusat dalam bentuk laporan online. Apabila terlambat dalam melaksanakan pelaporan BOS baik dalam bentuk fisik maupun online, maka rekening BOS akan dibekukan sementara waktu sampai bendahara selesai melakukan pelaporan.

Adapun proses pengawasan yang dapat dilakukan terdiri dari tiga kegiatan pokok diantaranya; (1) pemantauan (monitoring), (2) evaluasi, dan (3) pelaporan hasil temuan. Kegiatan/monitoring dilakukan dalam kaitannya dengan kinerja yang aktual, baik proses maupun hasil. Auditing selalu berkaitan dengan keuangan, artinya bahwa auditing hanya fokus pada manajemen keuangan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini keuangan tersebut mencakup tanggung jawab untuk penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan utang dari bendaharawan kepada pihak yang berwenang. (Arikunto. S, 2008).

Menurut Pigawahi dalam Manullang (1990, dalam Budi, 2018), menjelaskan bahwa proses pengawasan sekolah dasar yang efektif meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pemahaman tentang kode etik dan panduan dalam implementasi, menganalisis dan menentukan penyebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif, dan menarik kesimpulan atau penilaian. Selain itu, mengukur atau mengevaluasi kinerja terhadap kriteria yang ditentukan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi. Jika ada penyimpangan, mereka dapat segera diperbaiki. Pengawas pembiayaan memiliki tugas untuk mengawasi perencanaan dana dan pelaksanaan penggunaan dana. Dalam setiap perencanaan tentu telah dirancang dengan baik, akan tetapi tujuan tidak selalu dapat tercapai. Maka dari itu, dalam setiap penyelenggaraa pendanaan perlu adanya pengawasan.

Sebagai sekolah swasta yang tergolong baru, sekolah berupaya melaksanakan penggunaan pembiayaan sesuai dengan prosedur, sehingga dalam pengawasan tidak ditemukan pelanggaran seperti penggunaan dana BOS diluar juknis yang telah ditentukan, penyelewengan penggunaan dana

(korupsi), hanya dalam penggunaan pembiayaan sekolah terkadang mengalami kendala yaitu sebagai contoh dalam pengadaan barang tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan akibat pandemi covid-19, sumber dana dari masyarakat mengalami kemacetan sehingga sekolah harus menunggu pencairan tahap BOS selanjutnya.

Kepala SMP Ma'had Darussa'adah mengatakan bahwa dalam pelaporan dana BOS di masa pandemi Covid-19 SMP Ma'had Darussa'adah mendapatkan keringanan dalam pelaporannya tidak sama dengan waktu normal. Saat pandemi Covid-19 dana BOS dapat dicairkan dalam bentuk kuota internet siswa yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dana BOS juga dihabiskan untuk memenuhi persiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di awal juli 2021 ini yaitu pengadaan wastafle untuk cuci tangan yang sebelumnya sekolah kami belum ada, pengadaan hand sanititizer, sabun cuci tangan, cairan disinfektan, termogun (cek suhu), dan seragam APBD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyetujui penggunaan dana Bantuan Usaha Sekolah (BOS) untuk membantu mempersiapkan sektor pendidikan di masa pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengklarifikasi penggunaan dana BOS selama Pandemi Covid-19 sesuai dengan Permendikbud No. 19/2020 tentang Perubahan Kebijakan Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Pedoman Teknis BOP PAUD dan paritas dalam keadaan darurat. 19. "Kami memberikan relaksasi penggunaan dana BOS hingga 100 persen pada saat pandemi Covid-19 ini," kata Nadiem dalam webinar, Senin (15 Juni 2020).

Nadiem menambahkan, celah penggunaan dana BOP dan dana BOS hanya dapat digunakan untuk kegiatan dan pengeluaran tertentu. Pertama, pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan online berbayar untuk guru dan siswa sehubungan dengan pelaksanaan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kedua, dana BOP PAUD, BOS, dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau hand sanitizer, masker, sabun cuci tangan atau alat bantu kebersihan dan kesehatan lainnya, termasuk termometer (termogun) (johannes, berita online Kompas.com, 2020).

SIMPULAN

Proses perencanaan kebutuhan pembiayaan sekolah dilakukan dengan mengadakan rapat untuk menyusun RKJM dan Aplikasi RKAS (Rencana kerja Anggaran kerja Sekolah). Rapat dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dengan dihadiri oleh yayasan, kepala sekolah, dewan guru dan staff, komite, serta perwakilan orang tua siswa masing-masing angkatan. Perencanaan meliputi kebutuhan sekolah dan kegiatan sekolah. Pengelolaan biaya pendidikan di sekolah dipegang oleh dua bendahara yang berbeda, satu bendahara sekolah (bertanggungjawab dengan biaya pendidikan bersumber dari Yayasan, Orangtua/wali, Donatur yang tidak mengikat), dua bendahara BOS (bersumber dari pemerintah). Kegiatan Pelaksanaan Pembiayaan dengan mengacu pada RKJM disusun pada tahun 2020-2022) dan ARKAS (anggaran Tahun 2022), seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatatat dibuku yang berbeda sesuai dengan sumber dana yang digunakan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan kerjasama antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Prosedur pengawasan pembiayaan di SMP Ma'had Darussa'adah dilakukan oleh yayasan dalam bentuk laporan penggunaan setiap akhir bulan, dan akhir tahun pelajaran. pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk pemantauan dan evaluasi secara rutin baik diminta maupun tidak. Pengawas dari unsur dinas juga ikut andil dalam pelaksanaan pengawasan dengan memberikan arahan dan evaluasi pada kegiatan PKKS. Manajemen pembiayaan yang dilakukan di SMP Ma'had Darussa'adah dapat dikatakan cukup efektif sebagai lembaga pendidikan swasta yang

masih baru di usianya ke 8 tahun, SMP Ma'had Darussa'adah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, selain itu juga Yayasan tidak menuntut agar keuangan dikelola oleh pihak yayasan, karena jika hal ini terjadi termasuk kedalam pelanggaran juknis BOS yang dibuat oleh pemerintah bahwa melarang adanya penggabungan dana BOS dikelola oleh yayasan bagi sekolah dibawah naungan yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3 (2017), 87–99 <https://doi.org/10.25078/jpm.v3il.95>
- Ahmad, Munir.(2013). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Vol. 8, No. 2, hal. 225
- Arikunto, S. (2008). *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Ashadi.R.N & Suhaeb S. (2020). Hubungan Pemanfaatan Google Classroom Dan Kemandirian Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Ptik Pada Masa Pandemi. *Jurnal MEDIA ELEKTRIK*, Vol. 17, No. 2 hal.46
- Budi,B. (2018). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif .LIKHIPRAJNA*. *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume. 18. Nomor 1, hal 42-59.
- Depdiknas. Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 dan PP No.48 tahun 2008.
- Fahmi Awaludin, R., Bahri, S., & Muslih, M. (2021). Penerapan Zachman Framework Dalam Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 55–66. <https://doi.org/10.33365/JTK.V15I1.912> .
- Fattah, N. 2002. *Ekonomi dan embiayaan Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. 2008. *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9.
- Ferdi, W.P.(2013). *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis .Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, hal 567.
- Handayani, T., & Rasyid, A. A. (2015). PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI GURU, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI WONOSOBO. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(2), 264–277. <https://doi.org/10.21831/amp.v3i2.6342>.
- Hoy,W.K.,&Miskel,C.G.(2008). *Education Administration; Theory. Research , and Practice*. New York: McGraw-Hill Csmptions.Morphet Edgar C. 1983. *The Economic & Financing of Educatiort*. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs
- Meleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdiyanti, Y., & Pendidikan, S. P. (2018). PEMBAYARAN SPP DENGAN SYSTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH: STUDI PADA MADRASAH ALIYAH YPP BABAKAN JAMANIS. *Journal of Management Review*, 2(1), 183–189. <https://doi.org/10.25157/JMR.V2I1.1120>
- Oscar, D., Maulana, Y. I., Haidir, A., & We, A. G. A. U. B. S. I. I. S. D. P. S. B. (2019). Sistem Informasi SPP Dan Pembayaran Sekolah Berbasis Web Pada Mts Al-Ihsan Pondok Gede Bekasi. *SPEED - Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 11(3). <https://doi.org/10.55181/SPEED.V11I3.603>.
- Risnandi A. & Prayoga A. *Manajemenembiayaan Pendidikandi Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang*. *Ejournal, Cakrawla: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Vol. 3 No.2. 2019.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori dasar dan Praktik)*.Cet.III. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rusdiana, A., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, II* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).
- Sandra;, D. K. I. M. M. (2013). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan / Didin Kurniadin*. [//senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8733](https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8733)
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian*. Rosdakarya.
- Suwardi, S., Suprpti, S., & Danang, D. (2020). *MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA ADMINISTRASI*

